



PT28/P3
PMP 111-112

PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIMPUN BANGSA INDONESIA

(MATERI KELENGKAH PENATARAN P-4
DAN DAFTAR KIP MALANG)

Oleh

Tim Pengajar Jurusan PMP-KN FPIPS
yang berkerjasama dengan
Laboratorium Pancasila
KIP Malang

Penyedia

PANITIA PENYELANGGASAAN
PSTK DAN PENYATUAN P-4
KIP MALANG
Tahun 1987



UPT PERPUSTAKAAN
lib.um.ac.id/library@um.ac.id

KAAN
AS NEGERI

.5

6

MILIK PERPUSTAKAAN
IKIP MALANG



PT28/P3T
PMP 111-117

PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIJUP BANGSA INDONESIA

MATERI PELENGKAP PENATARAN P-4
DAN OPSPEK IKIP MALANG

Oleh

Tim Penulis Jurusan PMP-KN FPIPS
Bekerjasama dengan
Laboratorium Pancasila
IKIP Malang

Editor

Drs. M. Habib Mustopo
Drs. Warsito Su



UPT Perpustakaan UM



06780/HD/90

Penerbit

PANITIA PENYELENGGARA
OPSPEK DAN PENATARAN P-4
IKIP MALANG
Tahun 1987

MILIK PERPUSTAKAAN
IKIP MALANG

PERPUSTAKAAN TIMPA MAT NO	
Kode. Buku	No. Reg. : 0246 / 110
320.5 TIM P /	Tanggal : 12 DES 1998
	Jumlah : 4 e 1

PERPUSTAKAAN IKIP MALANG	
Kode. Buku	No. Reg. : 06780 / Hl.
320.5 INS P	14 AUG. 1990
	Jumlah : 4 - e 1

Pancasila



UPT PERPUSTAKAAN
lib.um.ac.id | lib@um.ac.id

Tim Penulis :

Bab II : Kedudukan Pancasila Dalam Negara Republik Indonesia.

Oleh : Drs. Sukarsono
Drs. Sunardi

Bab III. Asas-asas dan Pandangan Integralistik Dalam Sistem Kemasyarakatan dan Kenegaraan Republik Indonesia

Oleh : Drs. Wahid Siswoyo
Drs. Kutut Diara Astawa

Bab IV : Demokrasi Pancasila

Oleh : Drs. Suparman AW.
Drs. Suparlan AH.

Bab V. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila

Oleh : Drs. Slamet Riyadi
Drs. M. Yudhy Batubara
Drs. Sadryo
Drs. Yudhi Riyadi

Bab VI : Hakekat Pembangunan Nasional Adalah Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya

Oleh : Drs. Peri Suparto
Drs. Sirmadji C.P.

Bab VII : Filsafat Pancasila dan Ideologi Pancasila

Oleh : Drs. Soewarno Winarno
Drs. Cheppy Hari Cahyono



KATA PENGANTAR

Sejak tahun akademik 1984/1985 IKIP Malang telah menyelenggarakan Penataran P-4 Pola 100 jam, bagi mahasiswa baru pada tahun awal kuliah. Pelaksanaan penataran itu disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 86/DIKTI/KEP/1985.

Seperti diketahui bahwa penataran P-4 itu menurut Surat Keputusan BP-7 Pusat No. 01/BP-7/I/1984, bersifat intra-kurikuler dan pelaksanaannya dipadukan dalam pengenalan program studi, atau yang lebih dikenal dengan istilah Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus (OPSPEK).

Sejak tahun akademik 1986/1987, melalui Surat Keputusan Rektor IKIP Malang No. 0140/Kep/PT28.1/I/86, program Penataran P-4 Pola 100 jam, yang kemudian diikuti oleh perkuliahan PMP, setelah penataran itu berakhir, merupakan pengganti Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila (DUM 402) yang diberi bobot setara dengan 3 sks.

Perkuliahan PMP itu diharapkan mampu menumbuhkan wawasan, cara berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penataran P-4 itupun dimaksudkan pula agar mahasiswa lebih mendalami dan menghayati keterkaitan misi disiplin ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa, dengan upaya pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendekatan dan pengembangannya secara ilmiah.

Pada penataran P-4 Pola 100 jam tahun 1986, telah digunakan buku: **PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT DAN IDEOLOGI NASIONAL**, yang disusun oleh Laboratorium Pancasila IKIP Malang. Buku itu disusun sebagai salah satu buku sumber dan sekaligus sebagai buku rujukan khususnya untuk bahan perkuliahan PMP tahap kedua setelah kegiatan penataran P-4 tahap pertama.

Pengalaman dari pelaksanaan perkuliahan tahap pertama ini menunjukkan perlunya suatu buku sumber yang lebih terurai dan mengacu kepada GBPP Pancasila sebagai MKDU, yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti No. 25 Tahun 1984. Oleh sebab itu pada pelaksanaan Penataran P-4 dalam rangka OPSPEK tahun akademik 1987/1988, akan digunakan buku : "PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA (Materi Pelengkap Penataran P-4 dan OPSPEK IKIP Malang)" yang disusun oleh Tim Penulis yang terdiri dari dosen-dosen Jurusan PMP-KN IKIP Malang.

Dalam proses penyusunannya, naskahnya telah diseminarkan secara bersama antara Jurusan PMP-KN dengan Laboratorium Pancasila IKIP Malang. Naskah yang dibahas melalui seminar ini kemudian disunting hingga menjadi naskah buku seperti keadaannya sekarang.

Apabila buku ini dapat diterbitkan pada waktunya, hal itu tidak lain merupakan hasil kerjasama yang baik dari berbagai pihak, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para anggota Tim Penulis, para pembahas dalam seminar, dan Tim Penyunting.

Semoga buku ini bermanfaat, dan atas semua perhatian, bantuan, yang diberikan kepada usaha penyusunan buku ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Malang, 17 Agustus 1987

Rektor,

M. Hadi Soeparto

MAS HADI SOEPARTO, M.Sc
NIP. 130162057



UPT PERPUSTAKAAN
lib.um.ac.id | library@um.ac.id

→ *[Handwritten mark]*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. Pendahuluan	3 - 5
BAB II. <input checked="" type="checkbox"/> Kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia.	6 - 34
BAB III. Asas-asas dan Pandangan Integralistik Dalam Sistem Kemasyarakatan dan Kenegaraan Republik Indonesia	35 - 60
BAB IV. Demokrasi Pancasila	61 - 80
BAB V. Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila	81 - 106
BAB VI. <input checked="" type="checkbox"/> Hakekat Pembangunan Nasional Adalah Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya.	107 - 127
BAB VII. Filsafat dan Ideologi Pancasila	128 - 151



UPT PERPUSTAKAAN
lib.um.ac.id | library@um.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 berbagai usaha telah dilakukan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa serta usaha untuk mengisi kemerdekaan itu dengan jalan pembangunan. Salah satu usaha pembangunan itu adalah pembangunan di bidang pendidikan. Tujuan dari pendidikan nasional telah digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Juga telah digariskan bahwa dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh masyarakat. Pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.

Setelah MPR berhasil menetapkan ketetapan NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang merupakan penuntun serta petunjuk perilaku setiap warga negara Indonesia, maka arah dari pendidikan Pancasila semakin jelas. Pendidikan Pancasila adalah salah satu matakuliah di Perguruan Tinggi untuk membentuk warga negara Indonesia yang baik, yaitu warga negara Indonesia yang mampu memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila secara benar.

Pelaksanaan matakuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi umumnya dan di IKIP Malang khususnya terkait dengan kegiatan Penataran P-4 pola dukung 100 jam. Kegiatan penataran P-4 ini diikuti dengan kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan kuliah sekurang-kurangnya delapan kali pertemuan. Maksud kuliah lanjutan ini adalah untuk dapat mempertahankan apa yang telah diterima mahasiswa selama penataran P-4, untuk dapat lebih memantapkan penguasaan materi baik kedalaman maupun keluasannya serta mengupayakan agar para mahasiswa mampu menghayati serta mengamalkan Pancasila. Untuk maksud itulah maka buku ini disusun dengan mengemukakan enam pokok bahasan sebagai berikut :

Pokok bahasan pertama terdapat dalam bab II, Kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia. Dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber terbit hukum atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral serta cita-cita hukum yang meliputi

suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Dalam bab ini di-
bahas Pancasila dalam sosio budaya Indonesia, Pancasila dalam
UUD 1945 dan Pelestarian Pancasila dan UUD 1945.

Latar belakang Pancasila ditetapkan sebagai sumber tertib
hukum tentu tidak lepas dengan pandangan hidup bangsa
Indonesia yang dapat dikaji melalui sosio budaya Indonesia.
Sedangkan konsekuensi dari Pancasila sebagai sumber tertib
hukum, maka semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia
harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila,
baik hukum yang tertulis (UUD 1945, TAP MPR, Undang-undang/
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksanaan lain-
nya) maupun hukum yang tidak tertulis.

Pokok bahasan kedua adalah Asas-asas dan Pandangan
Integralistik dalam Sistem Kemasyarakatan dan Kenegaraan Re-
publik Indonesia.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dapat dikaji le-
bih lanjut dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan Republik
Indonesia. Dalam masyarakat dan negara kita asas dan pandangan
integralistik terjelma dalam hidup kemasyarakatan seperti adanya
asas kekeluargaan, kesatuan, keseimbangan walaupun
masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat sesuai dengan asas
Integralistik ini. Dalam hidup kenegaraan asas integralistik terjel-
ma dalam kelembagaan negara maupun dalam sistem pemerin-
tahannya.

Pokok bahasan ketiga adalah Demokrasi Pancasila. Negara
Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila. Dalam rangka
meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan
demokrasi Pancasila dikalangan mahasiswa maka pokok bahasan
ini menguraikan tentang asas-asas demokrasi Pancasila, sumber
dan landasan hukum demokrasi Pancasila serta tata kerja kelem-
bagaan demokrasi Pancasila.

Pokok bahasan keempat adalah Hak-hak Asasi Manusia ber-
dasarkan Pancasila. Dalam negara demokrasi Pancasila perlin-
dungan terhadap hak-hak asasi perlu mendapat jaminan. Untuk
dapat melaksanakan hak-hak asasinya dengan baik warga negara
Indonesia perlu memahami hak-hak asasi manusia pada umum-
nya, serta hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Dalam
hal ini perlu kesadaran warga negara Indonesia bahwa dalam
demokrasi Pancasila perlu keseimbangan antara hak dan kewaji-
ban manusia itu.

Pokok bahasan kelima membahas Hakekat Pembangunan

Nasional - Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya. Dalam bab ini diketengahkan tentang watak dan wawasan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dan metode pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.

Pokok bahasan keenam adalah Filsafat Pancasila. Dalam pokok bahasan ini dibahas tentang pengertian dan batasan filsafat, ruang lingkup filsafat, aliran-aliran filsafat, rasional Pancasila sebagai ajaran filsafat, pokok-pokok ajaran filsafat Pancasila, Pancasila sebagai ideologi nasional, pengembangan filsafat dan ideologi Pancasila serta pelestarian filsafat dan ideologi Pancasila.

Setiap pokok bahasan di atas dilengkapi dengan tugas-tugas terstruktur sebagai bahan yang akan didiskusikan lebih lanjut pada jam pertemuan kuliah. Tujuannya tidak lain adalah untuk dapat mengembangkan penguasaan materi serta kemampuan untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila. Demikianlah secara garis besar isi buku referensi pelengkap pendalaman penataran P-4 pola 100 jam ini.



UPT PERPUSTAKAAN
lib.um.ac.id library@um.ac.id

BAB II

KEDUDUKAN PANCASILA DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN

Setiap bangsa di dunia selalu mendambakan kehidupan yang ideal sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang dimiliki. Nilai-nilai kehidupan tersebut, dalam proses perkembangannya terdapat nilai-nilai yang kemudian tidak dapat bertahan, karena tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Namun tidak sedikit pula nilai-nilai yang tetap bertahan, justru karena nilai-nilai tersebut selalu dapat menampung dinamika perkembangan kehidupan dari suatu bangsa. Dengan adanya nilai-nilai yang tetap bertahan tersebut, kemudian lahirah sekumpulan nilai yang tetap bertahan dan dipertahankan dalam proses kehidupan suatu bangsa. Nilai-nilai yang tetap bertahan tersebut kemudian memperoleh posisi tertentu dalam kehidupan suatu bangsa. Bahkan setelah bangsa tersebut kemudian terorganisir dengan baik dalam ikatan organisasi yang disebut negara, nilai-nilai tersebut memiliki posisi tertentu dalam kehidupan bernegara.

Gambaran seperti tersebut diatas berlaku pula bagi bangsa Indonesia. Dalam proses kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia memiliki sekumpulan nilai yang tetap bertahan dan mampu menampung dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan setelah bangsa Indonesia terikat dalam suatu ikatan yang berbentuk negara sekumpulan nilai tersebut memiliki posisi yang menentukan. Dalam proses perkembangannya, sekumpulan nilai yang tetap bertahan tersebut kemudian dikenal dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu adalah kenyataan sosial budaya yang tumbuh pada suatu masa tertentu. Kenyataan sosial budaya itu mempunyai dua sifat yaitu obyektivitas dari pada kenyataan sosial dan sekaligus subyektivitas dari pada masyarakat Indonesia. Setiap kenyataan sosial diwujudkan, dijilamkan oleh suatu aktivitas yang mempunyai arti subyektif. Kenyataan sosial itu tidak saja berakar pada masa lampau tetapi juga berakar pada keaktifan manusia Indonesia masa kini. Oleh karena itu identitas bangsa adalah subyektivitas bangsa Indonesia, sekaligus juga kepribadiannya. Kepribadian bangsa kita merupakan sumber harga diri dan sumber vitalitasnya. Nilai-nilai mencerminkan jiwa atau asas rohani bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tetap bertahan dan mampu menampung dinamika kehidupan bangsa Indonesia terse-